



Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan: Analisis Sektor Informal dan Kerentanan Kemiskinan di Indonesia

Febriani Putri Lena Bengu

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Email: febriput28.02@gmail.com

ABSTRAK

Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted April 30, 2026

Keywords:

Poverty, Income Inequality, Informal Sector, Vulnerability to Poverty, Social Protection, Indonesia.

ABSTRACT

Poverty and income inequality are persistent structural challenges in Indonesia, fundamentally related to the dominance of the informal sector in the labor market. This article aims to analyze the relationship between the characteristics of the informal sector and the level of vulnerability to poverty in Indonesia through a literature review and recent data analysis. In contrast to static (ex-post) poverty measurements, this article emphasizes the concept of vulnerability to poverty as a measure of a household's risk of falling into poverty in the future due to economic shocks. Findings indicate that the informal sector in Indonesia is characterized by low productivity, limited educational levels of its workers, and wages significantly below those of the formal sector. Additionally, informal workers, especially the younger demographic, have a high level of vulnerability to health and economic crises such as the COVID-19 pandemic. Further analysis reveals that limited access to national social protection schemes (NHIS/BPJS) is a major factor exacerbating the risk of extreme poverty in both rural and urban areas. In conclusion, effective poverty alleviation policies must go beyond short-term assistance and focus on strengthening social security and increasing the productivity of informal workers to reduce income inequality in the long term.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 30, 2026

Revised May 8, 2026

Accepted May 16, 2026

Keywords:

Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan, Sektor Informal, Kerentanan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Indonesia.

ABSTRAK

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan tantangan struktural yang persisten di Indonesia, yang secara fundamental berkaitan dengan dominasi sektor informal dalam pasar tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik sektor informal dengan tingkat kerentanan kemiskinan di Indonesia melalui tinjauan literatur dan analisis data terkini. Berbeda dengan pengukuran kemiskinan statis (ex-post), artikel ini menekankan pada konsep kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) sebagai ukuran risiko rumah tangga untuk jatuh miskin di masa depan akibat guncangan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa sektor informal di Indonesia ditandai oleh produktivitas yang rendah, tingkat pendidikan pengelola yang terbatas, serta upah yang jauh di bawah sektor formal. Selain itu, pekerja informal, terutama kelompok muda, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap krisis kesehatan dan ekonomi seperti pandemi COVID-19. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap skema perlindungan sosial nasional (NHIS/BPJS) menjadi faktor utama yang memperburuk risiko



kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan dan perkotaan. Sebagai simpulan, kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif harus melampaui bantuan jangka pendek dan berfokus pada penguatan jaminan sosial serta peningkatan produktivitas pekerja informal untuk mengurangi kesenjangan pendapatan secara jangka panjang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:**Febriani Putri Lena Bengu**

Universitas Negeri Makassar

E-mail: febriput28.02@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi tantangan multidimensional yang persisten dalam agenda pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan makro menunjukkan tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini bersifat dinamis dan stokastik, di mana banyak rumah tangga berada dalam posisi "hampir miskin" yang sangat rentan untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan akibat guncangan ekonomi (Kumala et al., 2013). Fokus kebijakan pengentasan kemiskinan kini mulai bergeser dari sekadar identifikasi status kemiskinan saat ini (*ex-post*) menuju pengukuran kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) yang bersifat antisipatif (*forward-looking*).

Salah satu determinan utama dari kerentanan ini adalah struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh sektor informal. Sektor informal sering kali dianggap sebagai "katup penyelamat" yang menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal, namun di sisi lain, sektor ini menyimpan persoalan kesenjangan pendapatan yang akut. Menurut Rothenberg et al. (2016), unit usaha di sektor informal Indonesia umumnya berskala mikro, memiliki produktivitas rendah, dan dikelola oleh individu dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Kondisi ini menciptakan dualisme ekonomi di mana pekerja informal terjebak dalam upah rendah dan ketiadaan kepastian kerja, yang memperlebar jurang kesenjangan pendapatan dengan pekerja di sektor formal.

Kerentanan di sektor informal semakin nyata ketika terjadi guncangan eksternal berskala besar. Pandemi COVID-19, misalnya, telah mengekspos kerapuhan angkatan kerja, khususnya pekerja muda yang mayoritas bekerja dalam kondisi tidak aman (*precarious work*) di sektor informal (Pratomo et al., 2025). Selain itu, terdapat disparitas kerentanan yang signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Di wilayah perdesaan, ketergantungan yang tinggi pada sektor informal dengan akses yang terbatas terhadap pasar dan modal memperbesar risiko rumah tangga untuk mengalami kemiskinan ekstrem dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Damanik & Zebua, 2025).

Masalah ini diperparah oleh rendahnya cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Meskipun pemerintah telah mengupayakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan universal, skema pendaftaran sukarela bagi sektor informal masih menghadapi hambatan besar terkait kapasitas finansial dan kesadaran administratif (Dartanto et al., 2020). Tanpa jaminan



sosial yang memadai, guncangan kesehatan atau ekonomi dapat dengan cepat mengubah status rumah tangga dari sejahtera menjadi miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme keterkaitan antara sektor informal, kesenjangan pendapatan, dan kerentanan kemiskinan di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor penentu kerentanan, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan efektif dalam memitigasi risiko kemiskinan di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Teori dan Karakteristik Sektor Informal

Sektor informal di negara berkembang sering kali dipandang melalui dua lensa teoretis: sebagai wadah bagi wirausahawan yang menghindari regulasi atau sebagai strategi bertahan hidup bagi mereka yang terpinggirkan dari sektor formal. Rothenberg et al. (2016) melalui studinya di Indonesia menemukan bahwa mayoritas perusahaan informal adalah unit mikro dengan kurang dari lima pekerja. Karakteristik utamanya meliputi produktivitas yang rendah, penggunaan teknologi yang minimal, serta pengelolaan oleh individu dengan latar belakang pendidikan rendah. Sektor ini cenderung melayani pasar lokal dan memiliki hambatan besar dalam melakukan ekspansi usaha (Rothenberg et al., 2016).

Konsep Kerentanan Kemiskinan (*Vulnerability to Poverty*)

Literatur terbaru menekankan bahwa pengukuran kemiskinan tidak boleh hanya bersifat statis. Kumala et al. (n.d.) menjelaskan bahwa banyak rumah tangga berada di sekitar garis kemiskinan (*near-poor*) dan memiliki probabilitas tinggi untuk jatuh miskin di masa depan (Kumala et al., 2013). Konsep kerentanan ini sering diukur menggunakan pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP), yang melihat kemiskinan sebagai risiko stokastik yang dipicu oleh berbagai guncangan (Wei et al., 2023). Faktor-faktor penentu kerentanan meliputi aset rumah tangga, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan ketergantungan pada sektor informal yang tidak stabil (Damanik & Zebua, 2025; Veillette et al., 2025).

Sektor Informal dan Kerentanan terhadap Guncangan Eksternal

Kerentanan sektor informal menjadi sangat nyata ketika terjadi krisis global. Pratomo et al. (2025) menyoroti fenomena *fragile workforce* pada tenaga kerja muda di Indonesia selama pandemi COVID-19 (Pratomo et al., 2025). Pekerja muda di sektor informal cenderung mengalami kerentanan yang lebih tinggi karena kurangnya pengalaman kerja, kontrak yang tidak mengikat, dan terbatasnya jaring pengaman sosial. Selain itu, aspek kesehatan menjadi pemicu kerentanan yang signifikan; kegagalan dalam memitigasi risiko kesehatan dapat menjerat rumah tangga informal ke dalam siklus kemiskinan yang kronis.

2.4. Perlindungan Sosial dan Mitigasi Risiko

Perlindungan sosial berperan sebagai instrumen kunci dalam mengurangi kerentanan. Namun, implementasinya pada sektor informal menghadapi tantangan besar. Dartanto et al. (2020) mengidentifikasi bahwa pendaftaran sukarela dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja informal sering terhambat oleh keterbatasan modal ekonomi dan sosial (Dartanto et al., 2020). Senada dengan hal tersebut, Ngadi et al. (2025) menekankan perlunya perluasan



kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal untuk meningkatkan produktivitas dan resiliensi mereka terhadap risiko kecelakaan kerja atau hari tua (Ngadi et al., 2025).

Mengenai efektivitas bentuk bantuan, Msuha (2025) memberikan komparasi antara bantuan tunai (*cash transfers*) dan bantuan barang (*in-kind*). Temuan menunjukkan bahwa kedua modalitas tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap kesejahteraan rumah tangga dan pengurangan kerentanan, tergantung pada konteks pasar lokal dan kebutuhan spesifik rumah tangga (Msuha, 2025). Integrasi antara perlindungan kesehatan, jaminan tenaga kerja, dan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi prasyarat mutlak dalam memutus rantai kerentanan kemiskinan di sektor informal (Kajoskoski et al., 2025; Wei et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep kerentanan kemiskinan dan karakteristik sektor informal melalui sintesis berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan.

Sumber Data Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui:

1. Studi Dokumen: Analisis terhadap beberapa artikel jurnal bereputasi yang membahas kemiskinan dan sektor informal.
2. Data Statistik Publik: Laporan tren ketenagakerjaan dan konsumsi dari (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024b, 2024a) periode 2019-2023 sebagai bukti empiris yang mendukung analisis kualitatif.

Analisis data dilakukan secara naratif-deskriptif melalui teknik sintesis konten. Peneliti mengintegrasikan temuan-temuan dari literatur dengan tren data sekunder untuk membangun argumen mengenai risiko kerentanan kemiskinan di Indonesia. Proses analisis mencakup kategorisasi tema, komparasi temuan antar-studi, dan interpretasi tren data konsumsi dalam konteks ekonomi makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penentu Kerentanan

Berbagai studi mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kerentanan kemiskinan. Kumala et al. (2013) menemukan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga dipengaruhi oleh: (1) umur kepala rumah tangga (negatif); (2) tingkat pendidikan kepala rumah tangga (positif untuk pendidikan SMP ke atas); (3) ukuran rumah tangga (negatif – semakin besar jumlah anggota rumah tangga, semakin rendah pengeluaran per kapita); (4) proporsi anggota rumah tangga yang bekerja (positif); (5) akses kredit usaha (positif); (6) kondisi perumahan seperti jenis lantai, luas bangunan, dan sumber energi (positif); (7) akses informasi (positif); dan (8) shock inflasi (negatif).



Kajoskoski et al. (2025) dalam tinjauan sistematis mereka tentang kemiskinan energi di Eropa menemukan pola yang mirip: kelompok yang paling rentan adalah mereka dengan pendapatan rendah, status pekerjaan tidak stabil, kondisi hunian buruk, dan tingkat pendidikan rendah. Menariknya, kerentanan tidak berhenti pada tingkat pendapatan tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik fisik hunian, jenis bahan bakar yang digunakan, dan faktor spasial. Perbandingan lintas negara ini memberikan perspektif tambahan bahwa kerentanan kemiskinan merupakan fenomena universal yang memiliki pola struktural serupa meskipun konteks spesifiknya berbeda (Kajoskoski et al., 2025).

Studi Veillette et al. (2025) tentang kerentanan kemiskinan energi di Kanada menambahkan dimensi penting lainnya: rumah tangga yang terdiri dari satu orang merupakan kelompok yang paling rentan. Dengan penghasilan MBM (Market Basket Measure), risiko kemiskinan energi bagi rumah tangga satu orang mencapai 53,68 persen dalam bangunan berkinerja rata-rata. Meskipun konteksnya berbeda (kemiskinan energi di negara maju vs kemiskinan umum di Indonesia), temuan ini relevan karena menunjukkan pentingnya ukuran dan komposisi rumah tangga dalam menentukan kerentanan terhadap berbagai bentuk kemiskinan (Veillette et al., 2025).

A. Kerentanan Pekerja Muda dan Kesenjangan Antargenerasi

1. Posisi Pekerja Muda dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Pekerja muda (18-24 tahun) menempati posisi yang secara struktural lebih rentan dalam pasar tenaga kerja dibandingkan kelompok usia lainnya. Data SAKERNAS Agustus 2022 menunjukkan tingkat pengangguran pemuda di Indonesia mencapai 13,9 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,8 persen (Pratomo et al., 2025). Kesenjangan ini mencerminkan hambatan masuk ke pasar kerja yang dialami pemuda, terutama yang baru lulus dari sistem pendidikan.

Teori 'The Precariat' yang dikemukakan Standing (2011) menggambarkan pekerja muda sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap ketidakstabilan kerja. Mereka seringkali hanya mendapatkan pekerjaan kontrak jangka pendek atau paruh waktu yang sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja saat terjadi penurunan ekonomi. Ketiadaan pengalaman kerja yang memadai menjadi hambatan struktural utama yang menempatkan pemuda pada posisi yang tidak kompetitif dibandingkan pekerja yang lebih senior (Standing, 2011).

Tingkat pengangguran pemuda Indonesia yang mencapai 13,9 persen juga lebih tinggi dibandingkan Malaysia (12,55 persen) dan jauh di atas Thailand (5,37 persen), mengindikasikan bahwa sistem pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam hal mempersiapkan dan mengintegrasikan angkatan kerja muda ke dalam ekonomi formal (Pratomo et al., 2025).

2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pekerja Muda

Pandemi COVID-19 memperjelas dan memperparah kerentanan yang sudah ada pada pekerja muda. Pratomo et al. (2025) menggunakan data SAKERNAS 2022 dengan metode regresi probit dan model seleksi Heckman untuk menganalisis risiko kehilangan



pekerjaan dan transisi ketenagakerjaan selama pandemi. Temuan utama mereka sangat mengkhawatirkan dari perspektif kebijakan.

Pertama, pemuda secara keseluruhan lebih rentan mengalami kehilangan pekerjaan. Efek marjinal menunjukkan bahwa perempuan muda lebih rentan dibandingkan laki-laki muda (koefisien 0,018 vs 0,006). Kedua, baik di daerah perkotaan (0,008) maupun pedesaan (0,013), pemuda menghadapi probabilitas kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kerentanan bersifat lintas geografis. Ketiga, sektor industri (0,156), keuangan (0,191), dan jasa (0,183) menunjukkan risiko kehilangan pekerjaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, dan inilah justru sektor yang banyak menyerap tenaga kerja muda.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika pemuda kehilangan pekerjaan, mereka mengalami hambatan serius untuk kembali bekerja. Efek marjinal transisi ke sektor formal adalah -0,089, ke sektor informal -0,092, dan probabilitas tetap menganggur meningkat sebesar 0,167. Ini berarti pemuda yang kehilangan pekerjaan cenderung tetap menganggur alih-alih beralih ke bentuk pekerjaan lain. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan kembali, mereka mengalami penurunan penghasilan yang signifikan: -0,114 di sektor formal dan -0,238 di sektor informal. Pola ini mencerminkan "scarring effect" (efek bekas luka) dari pengangguran dini yang dapat berdampak jangka panjang pada trajektori karir.

3. Transmisi Kemiskinan Antargenerasi

Kerentanan pekerja muda berkaitan erat dengan masalah transmisi kemiskinan antargenerasi. Kumala et al. (2013) menyebutkan bahwa anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga miskin kronis memiliki kemungkinan 35 persen lebih tinggi untuk tetap miskin saat dewasa dibandingkan anak dari rumah tangga tidak miskin kronis. Kemiskinan kronis menyebabkan rendahnya investasi sumber daya manusia, yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Pekerja muda yang saat ini rentan secara ekonomi dan masuk ke pasar kerja dengan penghasilan rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai akan cenderung membangun rumah tangga yang rentan di masa depan. Ini menciptakan spiral intergenerasi kemiskinan yang sangat sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pratomo et al. (2025) mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memitigasi kerentanan pekerja muda: (1) tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan probabilitas mendapatkan pekerjaan yang stabil; (2) latar belakang ekonomi keluarga yang lebih baik memungkinkan investasi dalam pengembangan keterampilan; dan (3) akses terhadap program pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, akses terhadap faktor-faktor mitigasi ini justru cenderung tidak merata dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang sudah memiliki keunggulan sosial ekonomi.

B. Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Informal

1. Sistem JKN dan Tantangan Cakupan Sektor Informal



Indonesia telah berkomitmen pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak Januari 2014, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Namun, pencapaian UHC menghadapi tantangan struktural yang besar, terutama terkait dengan pendaftaran pekerja sektor informal. Berbeda dengan pekerja formal yang secara otomatis terdaftar melalui mekanisme Pekerja Penerima Upah (PPU), pekerja informal harus secara sukarela mendaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Per Juli 2020, 221,84 juta jiwa telah tercakup JKN, dengan 131,36 juta di antaranya merupakan warga miskin dan rentan yang ditanggung premi oleh pemerintah (PBI). Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat kelompok besar yang tidak tercakup, terutama pekerja informal non-miskin yang menjadi kelompok "missing middle" (Dartanto et al., 2020). Kelompok ini secara ekonomi tidak memenuhi syarat untuk mendapat subsidi penuh, namun menghadapi kesulitan untuk membayar premi secara mandiri dan konsisten, terutama karena penghasilan mereka yang tidak tetap.

Studi kualitatif Dartanto et al. (2020) yang dilakukan di tiga wilayah berbeda (Deli Serdang, Pandeglang, dan Kupang) mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan pekerja informal untuk bergabung dengan JKN: (1) kondisi kesehatan; (2) pengaruh keluarga dan teman sebaya; dan (3) pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Studi ini menggunakan kerangka konseptual Bourdieu yang mencakup habitus, kapital, dan field untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang kompleks ini.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bergabung JKN

Temuan Dartanto et al. (2020) menunjukkan bahwa pengalaman sakit yang berat atauantisipasi risiko kesehatan merupakan pendorong utama pekerja informal untuk mendaftar JKN. Banyak informan baru mendaftar setelah mengalami atau menyaksikan anggota keluarganya harus menanggung biaya pengobatan yang sangat besar. Ini menunjukkan adanya adverse selection yang signifikan: mereka yang bergabung cenderung adalah mereka yang sudah memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau risiko kesehatan yang tinggi.

Pengaruh keluarga dan jaringan sosial terbukti sangat kuat dalam mendorong atau menghambat keputusan bergabung JKN. Efek word-of-mouth melalui jaringan sosial informal (keluarga, tetangga, kelompok keagamaan, rekan kerja) jauh lebih efektif dalam mendorong pendaftaran dibandingkan kampanye formal BPJS Kesehatan. Studi ini menemukan bahwa tokoh-tokoh informal di komunitas, termasuk pemimpin agama dan ketua RT/RW, memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi tentang manfaat JKN. Fakta ini memiliki implikasi penting bagi strategi perluasan cakupan JKN.

Keterbatasan pengetahuan tentang JKN juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun tingkat kesadaran tentang program JKN relatif tinggi, pengetahuan yang akurat tentang prosedur pendaftaran, manfaat, dan mekanisme pembayaran premi masih terbatas. Lebih jauh, terdapat penolakan berbasis religius di mana sebagian pekerja informal menolak bergabung JKN karena menganggap asuransi mengandung unsur gharar (ketidakpastian/perjudian) atau riba yang bertentangan dengan prinsip Islam.



3. Perlindungan Sosial Multidimensi

Perlindungan sosial bagi pekerja informal tidak boleh hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi harus bersifat multidimensi, mencakup jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, program pengembangan keterampilan, dan jaring pengaman sosial saat kehilangan pekerjaan. Pratomo et al. (2025) menekankan bahwa kurangnya jaring pengaman sosial yang memadai, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, semakin memperparah ketidakamanan kerja pemuda.

Perbandingan dengan sistem perlindungan sosial di negara-negara tetangga memberikan perspektif yang berguna. Malaysia dan Thailand memiliki tingkat pengangguran pemuda yang lebih rendah, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan kebijakan pasar kerja yang lebih proaktif. Kajoskoski et al. (2025) juga menemukan dalam konteks Eropa bahwa negara-negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat kemiskinan energi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa proteksi sosial yang komprehensif memiliki dampak nyata dalam mengurangi berbagai bentuk kerentanan.

Lebih jauh, studi Kumala et al. (2013) memperlihatkan bahwa pada rumah tangga rentan miskin di Jawa, proporsi yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan masih sangat tinggi, dengan sekitar 21-23 persen di perkotaan dan perdesaan yang tidak dapat berobat saat sakit. Ini menunjukkan bahwa meskipun program JKN telah ada, masih banyak hambatan non-finansial (akses fisik, informasi, stigma) yang menghalangi pemanfaatan layanan kesehatan oleh kelompok rentan.

C. Kesenjangan Pendapatan dan Dimensi Struktural Kemiskina

1. Pola Kesenjangan Pendapatan di Indonesia

Kesenjangan pendapatan di Indonesia merupakan cerminan dari berbagai ketidaksetaraan struktural yang saling berkaitan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang kuat antara status sosial ekonomi (SES) dengan kondisi kesehatan: semakin rendah SES, semakin tinggi kemungkinan kondisi kesehatan yang buruk (Dartanto et al., 2020). Ini menciptakan efek berlipat ganda di mana kemiskinan tidak hanya mengurangi akses terhadap layanan kesehatan, tetapi kondisi kesehatan yang buruk selanjutnya mengurangi produktivitas dan pendapatan, memperdalam kemiskinan.

Pola kesenjangan ini juga tercermin dalam distribusi akses terhadap pekerjaan formal. Data menunjukkan bahwa pekerja muda perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki (Pratomo et al., 2025), dan pekerja di daerah pedesaan menghadapi risiko yang berbeda namun tidak kalah serius dibandingkan pekerja perkotaan. Sementara daerah perkotaan menawarkan lebih banyak peluang kerja formal, daerah pedesaan terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan fasilitas pendidikan/pelatihan.

Teori kapital dan habitus Bourdieu yang digunakan Dartanto et al. (2020) memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami mekanisme reproduksi kesenjangan. Kapital ekonomi (pendapatan dan aset), kapital sosial (jaringan dan kepercayaan), dan kapital budaya (pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi) saling berinteraksi membentuk habitus yang menentukan perilaku dan pilihan individu, termasuk



dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kelompok dengan modal yang terbatas secara struktural cenderung terpinggirkan dari sistem perlindungan formal.

2. Kesenjangan Gender dan Kelompok Rentan Lainnya

Dimensi gender dalam kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia merupakan aspek yang sering kurang mendapat perhatian. Studi Pratomo et al. (2025) menunjukkan bahwa pekerja muda perempuan memiliki koefisien kerentanan yang lebih tinggi (0,018) dibandingkan laki-laki (0,006). Ini mencerminkan hambatan ganda yang dihadapi perempuan di pasar kerja: tidak hanya diskriminasi berbasis gender, tetapi juga beban kerja reproduktif dan perawatan yang tidak dibayar yang secara tidak proporsional ditanggung perempuan.

Kajoskoski et al. (2025) dalam kajian komparatif Eropa mereka menemukan bahwa perempuan menghadapi risiko kemiskinan energi yang lebih tinggi, terutama mereka yang merupakan orang tua tunggal atau yang terlibat dalam pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Pola serupa kemungkinan besar berlaku di Indonesia mengingat struktur keluarga dan pembagian kerja berdasarkan gender yang dominan. Selain itu, kelompok rentan lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus mencakup penyandang disabilitas, lansia yang tinggal sendiri, penduduk daerah terpencil, dan etnis minoritas.

Kumala et al. (2013) juga menemukan fenomena yang mengkhawatirkan terkait kemiskinan anak: lebih dari 88 persen anak pada rumah tangga rentan miskin tidak mendapatkan imunisasi lengkap, sekitar 14-21 persen kelahiran tidak dibantu tenaga medis, dan terdapat kasus anak-anak yang masih bekerja dan putus sekolah meskipun dengan proporsi yang relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada generasi saat ini berpotensi menciptakan kemiskinan pada generasi berikutnya melalui defisit modal manusia yang terbentuk sejak dini.

3. Kesenjangan Spasial dan Infrastruktur

Kesenjangan pendapatan di Indonesia juga memiliki dimensi spasial yang kuat. Perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara wilayah barat dan timur Indonesia mencerminkan ketidakmerataan pembangunan yang telah berlangsung lama. Kumala et al. (2013) menemukan bahwa pada tahun 2008, 64,7 persen rumah tangga miskin di Pulau Jawa tinggal di daerah pedesaan, dan mayoritas kepala rumah tangga bekerja di sektor primer seperti pertanian dan perikanan.

Keterbatasan infrastruktur fisik (jalan, listrik, air bersih, komunikasi) secara langsung mempengaruhi potensi ekonomi dan kerentanan kemiskinan. Studi Kumala et al. (2013) menemukan bahwa semakin jauh jarak dari pusat kota, semakin rendah pengeluaran per kapita rumah tangga. Ini mencerminkan bagaimana keterbatasan aksesibilitas menghalangi partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan akses terhadap layanan publik.

Veillette et al. (2025) dalam konteks yang berbeda (Kanada) juga menunjukkan bahwa kualitas hunian memiliki dampak signifikan terhadap kerentanan kemiskinan, di



mana bangunan dengan kinerja energi yang buruk secara substansial meningkatkan risiko kemiskinan energi. Analogi ini relevan untuk Indonesia: kualitas perumahan yang buruk tidak hanya mencerminkan kemiskinan yang ada, tetapi juga memperparah kerentanan melalui peningkatan pengeluaran energi, risiko kesehatan, dan produktivitas yang menurun.

D. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

1. Perluasan Perlindungan Sosial yang Inklusif

Implikasi kebijakan paling mendasar dari analisis ini adalah perlunya perluasan sistem perlindungan sosial yang secara aktif menjangkau pekerja sektor informal. Dartanto et al. (2020) merekomendasikan dua arah kebijakan utama: pertama, strategi promosi yang berfokus pada kampanye interaktif dan melibatkan tokoh informal lokal untuk memaksimalkan efek word-of-mouth; dan kedua, pengembangan kampanye yang menekankan sifat komunal JKN dan memberikan contoh konkret manfaat jangka panjang yang diperoleh.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan semi-contributory atau subsidi silang yang lebih canggih untuk menjangkau kelompok "missing middle". Model yang terlalu mengandalkan pendaftaran sukarela dengan premi flat terbukti tidak efektif untuk menjangkau seluruh lapisan pekerja informal. Inovasi dalam mekanisme pembayaran (misalnya pembayaran berbasis panen untuk petani, atau berbasis hasil tangkapan untuk nelayan) dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran premi secara signifikan.

Kumala et al. (2013) merekomendasikan pendekatan yang lebih proaktif dalam pencegahan kemiskinan, termasuk memberikan perhatian khusus pada rumah tangga rentan miskin. Memberikan perlindungan kepada rumah tangga yang berada di ambang kemiskinan jauh lebih efektif dari sisi biaya dibandingkan menangani kemiskinan setelah terjadi, karena mencegah efek domino dari guncangan ekonomi tunggal yang dapat mendorong banyak keluarga sekaligus ke bawah garis kemiskinan.

2. Kebijakan Ketenagakerjaan Inklusif untuk Pekerja Muda

Pratomo et al. (2025) menekankan perlunya intervensi kebijakan yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi pekerja muda. Ini mencakup: (1) penguatan program pengembangan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja; (2) perbaikan akses terhadap pekerjaan di sektor formal; dan (3) dukungan yang lebih baik selama masa penurunan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender dalam kesempatan kerja dan mendukung pekerja muda melalui perlindungan sosial dapat membantu memitigasi dampak jangka panjang dari ketidakstabilan awal karir.

Reformasi struktural juga diperlukan untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan kerja pemuda. Ini mencakup memperkuat hubungan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan inklusivitas program perlindungan sosial, dan mempromosikan akses yang adil terhadap kesempatan kerja di berbagai wilayah dan kelompok demografis. Investasi berkelanjutan dalam pemberdayaan pemuda bukan hanya kritis bagi kesejahteraan individu, tetapi juga esensial bagi ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.



Pengalaman negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki tingkat pengangguran pemuda lebih rendah menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan. Studi komparatif lebih mendalam tentang praktik terbaik dari negara-negara ASEAN dalam kebijakan ketenagakerjaan pemuda dapat memberikan panduan yang berguna bagi Indonesia.

3. Pendekatan Holistik Penanggulangan Kemiskinan

Kajoskoski et al. (2025) menemukan dalam konteks Eropa bahwa solusi yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan (dalam hal ini kemiskinan energi) adalah kombinasi dari berbagai intervensi yang saling melengkapi: perbaikan kualitas perumahan/infrastruktur, insentif keuangan yang ditargetkan, promosi perilaku hemat sumber daya, kolaborasi dengan aktor lokal, dan perubahan kebijakan sosial, ekonomi, dan perumahan yang lebih luas. Pendekatan sektoral yang terfragmentasi terbukti kurang efektif.

Prinsip yang sama berlaku untuk kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan langsung tunai atau subsidi semata. Diperlukan integrasi antara kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan JKN harus dikoordinasikan secara sistematis untuk mencapai dampak yang sinergis.

Kumala et al. (2013) secara khusus merekomendasikan agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat reaktif (menangani kemiskinan yang sudah terjadi), tetapi juga proaktif (mencegah jatuhnya rumah tangga rentan ke dalam kemiskinan). Dengan demikian, sistem informasi dan monitoring kerentanan kemiskinan yang akurat dan real-time menjadi infrastruktur kebijakan yang sangat penting. Penggunaan pendekatan VEP atau variasinya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok rentan sebelum mereka jatuh miskin.

4. Penguatan Literasi Keuangan dan Asuransi

Studi Dartanto et al. (2020) menegaskan pentingnya peningkatan literasi asuransi sebagai salah satu kebijakan kunci untuk meningkatkan tingkat kepesertaan pekerja informal dalam JKN. Rendahnya literasi asuransi berkontribusi pada salah persepsi tentang manfaat dan mekanisme asuransi, serta ketidakpercayaan terhadap institusi formal. Program edukasi keuangan yang dirancang secara khusus untuk konteks sosial ekonomi pekerja informal, menggunakan bahasa lokal dan saluran komunikasi yang dipercaya komunitas, akan jauh lebih efektif dibandingkan kampanye massa yang bersifat generik.

Kajoskoski et al. (2025) juga menemukan bahwa berbagai bentuk "illiteracy" (literasi energi, keuangan, dan digital) berkontribusi pada kerentanan kelompok marginalisasi terhadap kemiskinan. Di Indonesia, rendahnya literasi keuangan, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan kelompok dengan pendidikan rendah, membatasi kemampuan rumah tangga untuk merencanakan keuangan jangka panjang, memanfaatkan layanan perbankan, atau mengakses skema asuransi yang tersedia.



Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki dimensi dinamis yang sangat dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja informal. Sektor informal terbukti berperan sebagai penyangga ekonomi (*shock absorber*), terutama selama periode pandemi COVID-19 (2020-2021), di mana terjadi peningkatan proporsi pekerja informal secara signifikan di tingkat nasional dan regional. Namun, peran tersebut dibarengi dengan kerentanan ekonomi yang tinggi. Karakteristik sektor informal yang didominasi oleh unit usaha mikro, produktivitas rendah, dan keterbatasan akses modal membuat para pekerjanya sulit untuk keluar dari jebakan pendapatan rendah.

Data pengeluaran per kapita periode 2019-2023 menunjukkan bahwa meskipun secara nominal terdapat peningkatan kesejahteraan, rumah tangga yang bergantung pada sektor informal tetap berada dalam risiko "hampir miskin". Berdasarkan pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP), faktor pendidikan yang rendah dan ketiadaan jaminan sosial formal menjadi pemicu utama rumah tangga informal jatuh ke bawah garis kemiskinan saat terjadi guncangan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan indikator pengeluaran statis, melainkan harus memitigasi risiko kerentanan secara *ex-ante*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024a). *Konsumsi per Kapita (bulan) tahun 2019-2023 Di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024b). *Sektor Informal tahun 2019-2023 di Indonesia*.
- Damanik, R., & Zebua, H. I. (2025). When Informality Meets Poverty: Vulnerability of Informal Workers in North Sumatra's Rural and Urban Divide. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 20(1), 2025–2029. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v20i1.463>
- Dartanto, T., Pramono, W., Lumbanraja, A. U., Siregar, C. H., Bintara, H., Sholihah, N. K., & Usman. (2020). Enrolment of informal sector workers in the National Health Insurance System in Indonesia: A qualitative study. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05316>
- Kajoskoski, T., Matschoss, K., Heiskanen, E., & Laakso, S. (2025). Recent developments in the energy poverty and vulnerability research in Europe: a systematic literature review. *Energy Strategy Reviews*, 61(August), 101855. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101855>
- Kumala, A. Z., Agustini, H. N., & Rais. (2013). Dinamika Kemiskina dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dalam Upaya Melindungi Anak-Anak dari Dampak Kemiskinan (Studi Kasus pada Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2008-2010). *Child Poverty and Social Protection Conference 1, 1776*, 1–35.
- Msuha, B. (2025). Cash or in-kind transfers: which social safety net has a greater impact on household welfare and vulnerability reduction? *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2594278>
- Ngadi, N., Asiati, D., Nurul Aini, Y., Astrelina Purba, Y., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor social security membership for informal workers in Indonesia. *Cogent*



Social Sciences, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>

Pratomo, D. S., Fitanto, B., Athoillah, M., Al Ayyubi, M. S., Nur Asrofi, D. A., Natalia, C., Zenritami, S. L., & Widyarini, A. (2025). The fragile workforce: Indonesian youth workers vulnerability during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2526467>

Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, 80, 96–113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>

Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.

Veillette, D., Rouleau, J., & Gosselin, L. (2025). Assessing vulnerability to energy poverty through occupant-centric building simulations. *Energy*, 340(November), 139241. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139241>

Wei, Y., Zhang, Z., & Zhang, M. (2023). Effects of health poverty alleviation project from the perspective of vulnerability to poverty: evidence from five Chinese prefectures. *Global Health Action*, 16(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2023.2260142>